

PENGARUH KOMPETENSI SDM, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PENGGUNAAN SISKUDES TERHADAP AKUNTABILITAS DANA DESA

Rahul Khan¹, Heni Yulsiati^{2*}, Siska Aprianti³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Sriwijaya

*e-mail: henny.yulsiati@yahoo.co.id

ABSTRACT

Purpose: *This study aims to examine the effect of Human Resource Competence, Government Internal Control System (SPIP), and the use of the Village Financial System (Siskeudes) on the accountability of village fund management in Pulau Rimau District, Banyuasin Regency.*

Method: *This research employs a quantitative approach with descriptive and associative methods. Primary data are collected through questionnaires distributed to village officials directly involved in village financial management. The population consists of 85 village officials from 17 villages in Pulau Rimau District, and all population members are used as the sample through a saturated sampling (census) technique. Data are analyzed using descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, t-test, F-test, and coefficient of determination (R^2) with the assistance of SPSS software.*

Finding: *The results show that Human Resource Competence does not have a significant effect on the accountability of village fund management. Meanwhile, the Government Internal Control System (SPIP) and the use of Siskeudes have a positive and significant effect on village fund management accountability. Simultaneously, Human Resource Competence, SPIP, and Siskeudes significantly affect village fund management accountability. The adjusted R-square value of 0.754 indicates that 75.4% of the variation in accountability can be explained by these three variables.*

Novelty: *This study contributes to the literature by examining the influence of Human Resource Competence, SPIP, and Siskeudes on village fund management accountability in Pulau Rimau District, an area that has received limited research attention. Furthermore, this study incorporates the latest regulatory framework, namely Law Number 3 of 2024 concerning Villages, which has not been widely adopted in previous studies.*

Keywords:

Human Resource Competence, Government Internal Control System (SPIP), Siskeudes, Village Fund Management Accountability, Village Financial Management.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional melalui pengelolaan sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Indonesia terus meningkatkan alokasi dana desa sebagai bentuk komitmen dalam mendorong pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan dana desa menuntut adanya pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan *akuntabel* agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi aspek penting karena dana yang dikelola bersumber dari anggaran publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, tata kelola keuangan desa yang baik menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Pahlawan et al., 2020).

Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan untuk memperkuat tata kelola keuangan desa, berbagai permasalahan masih sering ditemukan dalam praktik pengelolaan dana desa. Kasus penyalahgunaan anggaran, keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian penggunaan dana, dan lemahnya pertanggungjawaban masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Permasalahan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, seperti kompetensi aparatur desa

yang belum memadai, sistem pengendalian internal yang belum berjalan efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan desa (Rahmawati et al., 2023).

Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, merupakan salah satu wilayah yang menerima alokasi dana desa dalam jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya. Besarnya dana yang dikelola menuntut aparatur desa untuk memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut. Namun, masih ditemukannya kegiatan rekonsiliasi dan evaluasi laporan keuangan desa secara berulang menunjukkan bahwa kualitas akuntabilitas pengelolaan dana desa masih memerlukan perhatian. Selain itu, di Kecamatan Pulau Rimau, pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perlunya peningkatan kualitas pelaporan keuangan, optimalisasi penggunaan Siskeudes, dan penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa masih memerlukan perhatian sehingga perlu diteliti faktor-faktor yang memengaruhinya.

Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pulau Rimau tahun 2025, masih ditemukan beberapa permasalahan seperti keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, perlunya rekonsiliasi laporan keuangan secara berulang, dan kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penggunaan aplikasi Siskeudes. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa masih memerlukan perhatian sehingga perlu diteliti faktor-faktor yang memengaruhinya.

Kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional akan lebih mampu menjalankan tugas pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kompetensi yang baik mendukung ketepatan dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan administrasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Sebaliknya, rendahnya kompetensi aparatur dapat menyebabkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, dan kurang optimalnya pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur desa menjadi salah satu upaya penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Hardianto et al., 2021).

Selain kompetensi sumber daya manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga berperan penting dalam menjaga kualitas pengelolaan dana desa. SPIP berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dirancang untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pengendalian yang efektif, risiko penyimpangan dan kesalahan dapat diminimalkan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih andal. Penerapan SPIP yang baik juga dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Namun, implementasi SPIP di tingkat desa sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman aparatur terhadap fungsi pengendalian internal (Huda & Octovian, 2025).

Perkembangan teknologi informasi juga mendorong pemerintah untuk menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai alat bantu pengelolaan keuangan desa. Siskeudes dirancang untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara terintegrasi. Penggunaan aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi pengelolaan dana desa. Namun demikian, efektivitas Siskeudes sangat bergantung pada kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan sistem tersebut. Ketika aparatur belum memiliki kemampuan yang memadai, manfaat penggunaan Siskeudes tidak dapat dirasakan secara optimal dan berpotensi memengaruhi kualitas akuntabilitas pengelolaan dana desa (Tunya et al., 2024).

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan hasil yang belum konsisten. Penelitian Tiarno dan Budiwitjaksono (2023) menemukan bahwa kompetensi SDM, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas

karena masih terdapat keterbatasan kemampuan teknis aparatur desa dalam pengelolaan keuangan. Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Rimau. Penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian yang mengkaji fenomena tersebut di wilayah Kecamatan Pulau Rimau masih terbatas. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan penggunaan Siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Beberapa penelitian menemukan pengaruh positif dan signifikan, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan hasil yang berbeda. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada konteks desa-desa di Kecamatan Pulau Rimau yang belum banyak diteliti. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Tiarso & Budiwitjaksono, 2023).

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori *Stewardship*

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan kewajiban suatu pihak untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang memberikan amanah. Dalam sektor publik, akuntabilitas menjadi dasar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik karena setiap kegiatan yang menggunakan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi unsur penting dalam pengelolaan keuangan desa (Mardiasmo, 2018).

Penelitian ini menggunakan teori *stewardship* sebagai landasan dalam menjelaskan hubungan antara aparatur desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Teori *stewardship* menjelaskan bahwa individu yang diberi amanah akan berupaya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Dalam konteks pemerintahan desa, aparatur desa berperan sebagai pengelola sumber daya publik yang diharapkan mampu mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Dengan demikian, semakin baik pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparatur desa, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas yang dapat diwujudkan dalam pengelolaan dana desa (Donaldson & Davis, 1991).

Dalam perspektif *stewardship theory*, aparatur desa dipandang sebagai *steward* yang bertanggung jawab mengelola sumber daya publik demi kepentingan masyarakat. Kompetensi SDM yang tinggi memungkinkan aparatur desa melaksanakan tugas pengelolaan dana desa secara profesional sehingga meningkatkan akuntabilitas. Demikian pula, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif akan membantu aparatur desa menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan tujuan organisasi. Selain itu, penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mendukung tersedianya informasi keuangan yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, teori *stewardship* menjadi landasan yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara kompetensi SDM, SPIP, penggunaan Siskeudes, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki individu dalam melaksanakan pekerjaan yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Kompetensi menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas karena individu yang kompeten akan lebih mudah memahami

prosedur kerja, menyelesaikan pekerjaan secara efektif, dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dalam pengelolaan dana desa, aparatur desa dituntut untuk memahami berbagai regulasi dan prosedur pengelolaan keuangan sehingga diperlukan kompetensi yang memadai agar proses pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku (Wibowo, 2022).

Kompetensi sumber daya manusia memiliki hubungan yang erat dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang baik akan lebih mampu menyusun laporan keuangan secara tepat, melaksanakan administrasi keuangan dengan benar, serta menghindari kesalahan dalam pengelolaan dana desa. Sebaliknya, rendahnya kompetensi dapat menyebabkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, dan rendahnya kualitas pertanggungjawaban keuangan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pendidikan dan pelatihan menjadi langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Hardianto et al., 2021).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. SPIP dirancang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, SPIP terdiri atas lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur tersebut saling berkaitan dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang baik (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008).

Penerapan SPIP yang efektif dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan dana desa karena seluruh aktivitas keuangan diawasi melalui mekanisme pengendalian yang terstruktur. Pengendalian yang baik dapat meminimalkan risiko kesalahan dan penyimpangan dalam penggunaan dana desa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih andal dan dapat dipercaya. Selain itu, SPIP juga membantu memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keberhasilan implementasi SPIP menjadi salah satu faktor yang mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa (Huda & Octovian, 2025).

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Aplikasi ini mendukung berbagai tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Penggunaan Siskeudes diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan serta mempermudah proses pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa juga dapat mengurangi potensi kesalahan yang disebabkan oleh proses manual (BPKP, 2023).

Penggunaan Siskeudes yang optimal berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem yang terintegrasi memungkinkan seluruh transaksi keuangan tercatat secara sistematis sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu. Transparansi dalam pengelolaan dana desa juga dapat meningkat karena setiap transaksi dapat ditelusuri melalui sistem yang digunakan. Namun demikian, efektivitas penggunaan Siskeudes sangat bergantung pada kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, penggunaan Siskeudes yang baik akan mendukung terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa yang lebih tinggi (Tunya et al., 2024).

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap

regulasi, dan kemampuan pemerintah desa dalam menjelaskan penggunaan dana desa kepada masyarakat. Tingkat akuntabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa dana desa telah dikelola secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang telah ditetapkan sebelumnya (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain transparansi dalam penyampaian informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan, serta kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang dimiliki pemerintah desa, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebaliknya, rendahnya akuntabilitas dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, menghambat pelaksanaan program pembangunan, dan meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan desa (Mardiasmo, 2018).

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori *stewardship* dan berbagai penelitian terdahulu, kompetensi sumber daya manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan penggunaan Siskeudes merupakan faktor yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi yang baik akan meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan. SPIP yang efektif akan memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian, sedangkan penggunaan Siskeudes akan meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Ketiga faktor tersebut saling mendukung dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Tiarno & Budiwitjaksono, 2023).

Kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memadai akan lebih mampu melaksanakan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan *stewardship theory*, aparatur desa yang kompeten akan berupaya menjalankan amanah masyarakat secara optimal sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kompetensi SDM berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan mekanisme yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam perspektif *stewardship theory*, aparatur desa sebagai pengelola dana publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan SPIP yang efektif dapat meminimalkan risiko kesalahan, penyimpangan, maupun penyalahgunaan dana desa sehingga kualitas akuntabilitas semakin meningkat. Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa SPIP berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam perspektif *stewardship theory*, penggunaan teknologi informasi menjadi sarana bagi aparatur desa untuk melaksanakan amanah masyarakat secara lebih transparan, efektif, dan akuntabel. Melalui penggunaan Siskeudes, setiap transaksi keuangan dapat dicatat dan dilaporkan secara sistematis sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat dan mudah dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, semakin optimal penggunaan Siskeudes maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dihasilkan. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Penggunaan Siskeudes berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil dari sinergi berbagai aspek yang mendukung tata kelola pemerintahan desa. Dalam perspektif *stewardship theory*, aparatur desa sebagai pengelola sumber daya publik dituntut memiliki kompetensi yang memadai, didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif, serta memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi SDM memungkinkan aparatur desa melaksanakan tugas dengan baik, SPIP berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian, sedangkan Siskeudes mendukung penyediaan informasi keuangan yang transparan dan akurat. Kombinasi ketiga faktor tersebut diyakini mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara menyeluruh. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan penggunaan Siskeudes secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian bertujuan menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Metode asosiatif dipilih untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang terlibat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa pada 17 desa di Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin. Populasi penelitian terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur perencanaan, dan perangkat desa lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Pemilihan populasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa aparatur desa merupakan pihak yang memahami proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sehingga dianggap mampu memberikan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *sampling jenuh (saturated sampling)*, yaitu teknik penentuan sampel yang menjadikan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian. Teknik ini digunakan karena jumlah populasi relatif kecil dan memungkinkan seluruh anggota populasi untuk dijadikan responden. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah sampel penelitian sebanyak 102 responden yang berasal dari 17 desa di Kecamatan Pulau Rimau. Dengan menggunakan *sampling jenuh*, penelitian diharapkan mampu memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, SPIP, dan penggunaan Siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian. Kuesioner menggunakan skala Likert lima poin yang terdiri atas sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Sebelum digunakan dalam penelitian, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa setiap pernyataan mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan konsisten. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan bantuan perangkat lunak *Statistical Package for Social Sciences (SPSS)*.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik responden dan variabel penelitian. Tahap berikutnya adalah pengujian kualitas data yang terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas sebagai syarat penggunaan analisis regresi linear berganda. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data penelitian memenuhi persyaratan statistik sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, SPIP, dan penggunaan Siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, dilakukan uji parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen serta uji simultan (uji F) untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Penelitian ini juga menggunakan koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang diperoleh dari analisis regresi linear berganda. Hipotesis diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Sebaliknya, hipotesis ditolak apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian kemudian diinterpretasikan sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Rimau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Penelitian ini dilakukan pada aparatur desa yang berada di Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian sebanyak 102 orang yang berasal dari 17 desa, dengan masing-masing desa diwakili oleh enam aparatur desa. Seluruh kuesioner yang disebarkan berhasil dikembalikan sehingga tingkat pengembalian kuesioner mencapai 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat respons yang sangat baik sehingga layak digunakan dalam proses analisis statistik lebih lanjut. Tingginya tingkat pengembalian kuesioner juga mengindikasikan adanya dukungan yang baik dari pemerintah desa terhadap pelaksanaan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 1
Karakteristik Responden

Karakteristik	Frekuensi	Persentase
SLTA	67	66%
Diploma	2	2%
S1	32	31%
S2	1	1%
Total	102	100%
Masa Kerja 1–3 Tahun	36	35%
Masa Kerja 3–5 Tahun	9	9%
Masa Kerja 5–10 Tahun	57	56%
Total	102	100%

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SPSS Versi 26, 2026

Berdasarkan karakteristik responden, sebagian besar aparatur desa memiliki tingkat pendidikan SLTA sebesar 66%, sedangkan lulusan sarjana mencapai 31%. Dari sisi pengalaman kerja, mayoritas responden memiliki masa kerja antara 5 sampai 10 tahun sebesar 56%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur desa telah memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Pengalaman kerja yang relatif panjang dapat menjadi modal penting dalam memahami proses pengelolaan keuangan desa, meskipun tingkat pendidikan formal sebagian besar masih berada pada jenjang pendidikan menengah.

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Kompetensi SDM (X1)	30,00	50,00	41,07	5,286

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
SPIP (X2)	30,00	50,00	41,43	6,136
Siskeudes (X3)	28,00	50,00	40,56	5,893
Akuntabilitas (Y)	30,00	50,00	41,21	6,224

Sumber : Output SPSS Versi 26, data primer diolah peneliti, 2026

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai rata-rata yang relatif tinggi. Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 41,43, diikuti oleh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 41,21, Kompetensi SDM sebesar 41,07, dan Penggunaan Siskeudes sebesar 40,56. Nilai standar deviasi pada seluruh variabel lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa data penelitian memiliki tingkat penyebaran yang relatif homogen sehingga tidak terdapat perbedaan yang terlalu ekstrem antarresponden dalam memberikan penilaian terhadap variabel yang diteliti.

Tabel 3
Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Hasil
Normalitas	Sig. 0,229 > 0,05
Multikolinearitas X1	Tolerance 0,504 ; VIF 1,985
Multikolinearitas X2	Tolerance 0,229 ; VIF 4,362
Multikolinearitas X3	Tolerance 0,239 ; VIF 4,175
Heteroskedastisitas	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Output SPSS Versi 26, data primer diolah peneliti, 2026

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi seluruh persyaratan statistik. Uji normalitas menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,229 yang lebih besar dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil uji multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga tidak ditemukan adanya gejala multikolinearitas. Selain itu, hasil uji heteroskedastisitas memperlihatkan pola penyebaran titik yang acak dan tidak membentuk pola tertentu sehingga model regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi layak digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian.

Tabel 4
Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien
Konstanta	1,924
Kompetensi SDM (X1)	0,076
SPIP (X2)	0,525
Siskeudes (X3)	0,355

Sumber : Output SPSS Versi 26, data primer diolah peneliti, 2026

Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 1,924 + 0,076X_1 + 0,525X_2 + 0,355X_3 + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki arah hubungan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel SPIP memiliki nilai koefisien terbesar yaitu 0,525, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sistem pengendalian internal akan memberikan pengaruh paling besar terhadap peningkatan akuntabilitas. Sementara itu, variabel Siskeudes memiliki koefisien sebesar 0,355 dan Kompetensi SDM sebesar 0,076. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor utama yang mampu meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

Tabel 5
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	t-hitung	Sig.	Keterangan
Kompetensi SDM (X1)	0,933	0,353	Tidak Signifikan
SPIP (X2)	5,022	0,000	Signifikan
Siskeudes (X3)	3,337	0,001	Signifikan

Sumber : Output SPSS Versi 26, data primer diolah peneliti, 2026

Tabel 6
Hasil Uji Simultan dan Determinasi

Uji	Nilai
F-hitung	104,369
Signifikansi	0,000
R Square	0,762
Adjusted R Square	0,754

Sumber : Output SPSS Versi 26, data primer diolah peneliti, 2026

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena memiliki nilai signifikansi 0,353 lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, SPIP dan Siskeudes terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,000 dan 0,001. Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai F-hitung sebesar 104,369 dan signifikansi 0,000. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,754 menunjukkan bahwa 75,4% variasi akuntabilitas dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemampuan aparatur desa yang dimiliki saat ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Walaupun sebagian besar responden memahami regulasi dan aturan mengenai pengelolaan dana desa, masih terdapat keterbatasan pada aspek keterampilan teknis, terutama dalam penyusunan laporan keuangan dan penggunaan teknologi informasi. Kondisi tersebut menyebabkan kompetensi yang dimiliki belum mampu diterjemahkan secara optimal ke dalam praktik pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengetahuan teoritis saja belum cukup untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas apabila tidak diimbangi dengan keterampilan teknis yang memadai.

Berbeda dengan kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang dihasilkan oleh pemerintah desa. Pengendalian internal berfungsi sebagai

mekanisme pengawasan yang mampu memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Melalui penerapan pengendalian yang efektif, risiko kesalahan maupun penyimpangan dapat diminimalkan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, SPIP menjadi faktor yang paling dominan dalam penelitian ini karena memiliki pengaruh terbesar terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian juga membuktikan bahwa penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penggunaan aplikasi Siskeudes membantu aparatur desa dalam melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan secara lebih sistematis dan terstandar. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan, cepat, dan akurat. Selain itu, penggunaan teknologi informasi mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan yang sering ditemukan pada sistem manual. Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan Siskeudes perlu terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dan penyediaan sarana teknologi yang memadai agar manfaat sistem tersebut dapat dirasakan secara maksimal.

Secara simultan, Kompetensi SDM, SPIP, dan Siskeudes terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak dapat dibentuk hanya oleh satu faktor saja, melainkan memerlukan sinergi antara kualitas sumber daya manusia, efektivitas sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi. Ketiga variabel tersebut saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab. Kompetensi aparatur menjadi modal dasar dalam menjalankan tugas, SPIP berfungsi sebagai alat pengawasan, sedangkan Siskeudes menjadi sarana pendukung dalam pelaksanaan administrasi keuangan desa. Kombinasi ketiga faktor tersebut terbukti mampu menjelaskan sebagian besar variasi akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

KESIMPULAN dan SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aparatur desa yang dimiliki saat ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Sebaliknya, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal yang efektif serta pemanfaatan teknologi informasi melalui Siskeudes mampu meningkatkan transparansi, ketepatan, dan kualitas pengelolaan keuangan desa. Secara simultan, ketiga variabel penelitian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan kontribusi sebesar 75,4%.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada desa-desa di Kecamatan Pulau Rimau dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner. Oleh karena itu, hasil penelitian belum dapat digeneralisasi untuk seluruh desa di Kabupaten Banyuasin maupun daerah lainnya. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu kompetensi SDM, SPIP, dan penggunaan Siskeudes, sehingga masih terdapat faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang belum diteliti.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi SPIP serta mengoptimalkan penggunaan Siskeudes melalui pelatihan teknis, pendampingan berkelanjutan, dan penyediaan sarana pendukung yang memadai. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur desa perlu difokuskan pada pengembangan keterampilan teknis pengelolaan dan pelaporan keuangan berbasis teknologi. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, seperti komitmen organisasi, pengawasan eksternal, partisipasi masyarakat, dan transparansi informasi keuangan. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas

wilayah penelitian atau menggunakan pendekatan mixed methods untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mendalam.

REFERENSI

- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Hardianto, W. T., dkk. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(2), 45–58.
- Huda, M., & Octovian, A. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 12(1), 35–48.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162–172. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Rahmawati, R., Heriana, T., Sari, M. D., Dewi, S., & Almas, N. (2023). *Akuntabilitas pengelolaan dana desa: Kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal*. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1533–1542. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12881>.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tiarno, S. M., & Budiwitjaksono, G. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(4), 1–18.
- Tunya, M. G., dkk. (2024). Pengaruh Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 9(2), 67–80.
- Wibowo. (2022). *Manajemen Kinerja (Edisi Keenam)*. Depok: Rajawali Pers.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2023). *Pedoman Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)*. Jakarta: BPKP.